

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST)
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA**

**(Studi Kasus: Desa Teluk Paring, Desa Kota Raja dan Desa
Telaga Hanyar)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)
pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

LISA

20.22.245

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

AMUNTAI

2025

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

Nama : LISA
NPM : 2022245
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) DALAM MENINGKATKAN KESEJATERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS: DESA TELUK PARING, DESA KOTA RAJA DAN DESA TELAGA HANYAR)

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, Oktober 2025

Pembimbing 1



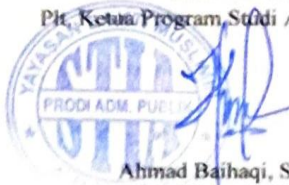
Ni Made Musiyani Anjasmari, M.AP
NUPTK.1635759660230382

Pembimbing 2



Herry Febriadi, SH, MH, CPRM
NUPTK. 8557767668131032

Pt. Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Desa Teluk Paring, Desa Kota Raja dan Desa Telaga Hanyar)”** sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Terwujudnya proposal skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua beserta keluarga, atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Dr. Reno Afrian, S.Sos., M.AP., CIQnR., CIQaR.
3. Seluruh Dosen dan Sekolah Tinggi Administrasi Amuntai yang telah berjasa membekali penulis ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
4. Teman-teman penulis yang serta merta memberikan dukungan dan motivasi selama proses penyelesaian proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proposal skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan

masukan baik kritik maupun saran yang membangun demi penyempurnaan proposal skripsi ini. Akhir kata tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan motivasi yang begitu berpengaruh terhadap penelitian ini.

Amuntai, Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teoritis	10
1. Kebijakan Publik	10
2. Efektivitas	13
3. Bantuan Sosial Uang	19
4. Kesejahteraan Masyarakat	20
C. Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Tipe Penelitian	24
D. Data dan Sumber Data.....	25
E. Desain Operasional Penelitian	27
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisis Data	30
H. Uji Kredibilitas Data	31
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahun 2025	3
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	26
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	23
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1), di mana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, serta ayat (2) yang mengamanatkan pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan amanat tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, serta Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Bantuan Sosial Tunai (BST), yang mengatur mekanisme penyaluran bantuan agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program bantuan sosial.

Salah satu program perlindungan sosial yang menonjol adalah Bantuan Sosial Uang, yaitu Setiap keluarga penerima manfaat menerima bantuan sebesar Rp200.000,00 per bulan untuk 10 (Sepuluh) bulan, pencairannya melalui 3 tahap. Bantuan ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah kondisi sosial-ekonomi yang rentan.

Kondisi serupa juga terjadi di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan sosial-ekonomi. Dimana sebagian masyarakat tergolong miskin dan rentan miskin, sehingga membutuhkan intervensi kebijakan sosial yang efektif, salah satunya melalui program bantuan sosial Uang. Sebagai perpanjangan tangan kebijakan pusat, Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya bidang Rehabilitasi Sosial, memiliki peran penting dalam penyalurkan Bantuan Sosial Uang kepada keluarga penerima manfaat. Peran ini tidak hanya sebatas menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan ketepatan sasaran, keberlanjutan manfaat, serta mendorong agar bantuan sosial dapat menjadi stimulan menuju kemandirian ekonomi keluarga penerima.

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, penerima Bantuan Sosial Tunai di Kecamatan Amuntai Selatan sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Karakteristik penerima seperti ini menuntut adanya mekanisme penyaluran secara door to door agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak. Kondisi ini menjadikan pelaksanaan Bantuan Sosial Uang di daerah ini memiliki tantangan tersendiri, baik dari segi ketepatan sasaran maupun efektivitas pendampingan di lapangan.

Penelitian ini berfokus di Kecamatan Amuntai Selatan, meliputi Desa Teluk Paring, Desa Kota Raja dan Desa Telaga Hanyar. Dapat dilihat data Bantuan Sosial Tunai di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 1. 1
Data Bantuan Sosial Uang Kecamatan Amuntai Selatan
Tahun 2025

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kota Raja	2	2	4
2	Telaga Silaba	2	1	3
3	Harusan Telaga	-	4	4
4	Telaga Sari	-	1	1
5	Kayakah	3	-	3
6	Mamar	1	1	2
7	Murung Panggang	1	1	2
8	Iilir Mesjid	-	3	3
9	Cangkering	2	-	2
10	Telaga Hanyar	-	1	1
11	Padang Tanggul	1	-	1
12	Padang Darat	2	-	2
13	Teluk Paring	2	2	4
14	Pulau Tambak	2	1	3
15	Jarang Kuantan	-	2	2
16	Jumba	4	2	6
17	Bajawit	2	3	5
18	Cempaka	-	4	4
19	Murung Sari	1	3	4
20	Rukam Hilir	3	1	4
21	Simpang Empat	2	2	4
22	Teluk Sari	4	2	6
23	Teluk Baru	1	4	5

(Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Jumlah penerima di setiap desa relatif kecil karena penyaluran Bantuan Sosial Uang difokuskan pada keluarga penerima manfaat dengan kategori rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan ODGJ. Data bantuan sosial uang pada Desa Teluk Paring pada tahun 2025 sebanyak 4 orang, pada Desa Kota Raja sebanyak 4 orang, dan pada Desa Telaga Hanyar Sebanyak 1 orang.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial uang di Kecamatan Amuntai Selatan, khususnya di Desa Teluk Paring, Desa Kota Raja, dan Desa Telaga Hanyar. Antara lain:

1. Sebagian penerima belum memahami tujuan program, sehingga bantuan sosial tunai belum dimanfaatkan secara optimal dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. *(sumber: Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara)*
2. Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan penyaluran bantuan masih dalam proses pengecekan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran. selain itu, jadwal penyaluran bantuan sosial tunai tidak menentu disetiap tahapannya. *(sumber: Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara)*
3. Sebagian keluarga penerima menunjukkan kecenderungan bergantung pada bantuan sosial tunai tanpa adanya upaya nyata untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, sehingga efektivitas program bantuan menjadi kurang optimal. *(sumber: Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara)*

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Desa Teluk Paring, Desa Kota Raja Dan Desa Telaga Hanyar)”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk menilai sejauh mana program Bantuan Sosial Uang berjalan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Peneliti memfokuskan penelitian menurut teori Edi Sutrisno (dalam Dedi Amrizal, dkk 2018: 43), Diantaranya:

- .1. Pemahaman program
2. Tepat sasaran
3. Tepat waktu
4. Tercapainya tujuan
5. Perubahan nyata

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Teluk Paring, Desa Kota Raja dan Desa Telaga Hanyar)?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Teluk Paring, Desa Kota Raja dan Desa Telaga Hanyar)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Untuk Mengetahui Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Amuntai

Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Teluk Paring, Desa Kota Raja Dan Desa Telaga Hanyar)

- b. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Teluk Paring, Desa Kota Raja Dan Desa Telaga Hanyar)

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian merujuk pada kontribusi atau kegunaan dari hasil penelitian, baik berguna bagi penambahan atau pengembangan pengetahuan, ilmu dan teknologi maupun bagi peneliti sendiri.

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur terkait Kebijakan Sosial dan Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Uang Oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada pada kecamatan Amuntai Selatan Khususnya Desa Teluk Paring, Desa Kota Raja Dan Desa Telaga Hanyar

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Dinas Sosial dalam meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial uang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- 2) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam

melakukan penelitian. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu peneliti untuk dapat mengetahui penerapan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan realita yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan suatu program.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam hal mendukung penelitian ini, peneliti tentunya menggunakan penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi dan acuan untuk bahan perbandingan. Adapun hasil penelitian terdahulu peneliti cantumkan sebagai berikut:

- 1. Ratna Porwati (2021) dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Padang Basar Hilir Dan Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara”,** pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Campbell J.P 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program BPNT di Desa Padang Basar Hilir dan Desa Sungai Turak Dalam Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak efektif. Pertama, keberhasilan program dilihat dari indikator kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja tidak efektif karena ewarong tidak mampu menyediakan berbagai jenis bahan pangan yang telah ditentukan. Kedua, keberhasilan sasaran dilihat dari indikator pencapaian tujuan tidak efektif karena masih ditemui masyarakat kurang mampu namun tidak mendapat bantuan. Ketiga, kepuasan program dilihat dari indikator keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna sudah efektif karena masyarakat puas dengan kualitas pangan yang mereka

terima. Keempat, tingkat input dan output dilihat dari indikator standar operasional prosedur tidak efektif karena pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasional prosedur. Kelima, pencapaian tujuan menyeluruh dilihat dari indikator meningkatkan

2. **Rizal Setiadi (2022) dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan”** Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan metode studi kasus dan wawancara dengan kepala desa, aparat desa, tokoh masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan tokoh masyarakat di Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap efektivitas program Bantuan Langsung Tunai di Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan beragam. Jadi Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Cukup Efektif dilihat dari aspek Pemahaman Program yang meliputi dari Sosialisasi Program dimana belum efektif dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007: 125-126) Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Penelitian ini hanya berfokus pada satu desa yaitu Desa Banua Hanyar Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke wilayah lain.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Abdul Wahab dalam Ida Syafriyani (2023:1) Kebijakan adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang di arahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Menurut Frank Jefkins dalam Ida Syafriyani (2023:1) Publik adalah sekelompok atau orang-orang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Publik adalah mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau mempengaruhi suatu bangsa, negara atau komunitas. Publik bisa di artikan sebagai:

- 1) Umum
- 2) Masyarakat
- 3) Negara atau Pemerintah

Kebijakan public merupakan suatu peraturan yang ditetapkan atau dibuat oleh orang yang mempunyai kekuasaan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada public. Jika di ibaratkan kebijakan public merupakan suatu hukum yang harus di taati, jadi bagi siapa pun yang melanggar akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Kebijakan Publik Menurut Thomas R.Dye dalam Ida Syafriyani (2023:2) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever*

governments choose to do or not to do)”.

Menurut David Eason dalam Ida Syafriyani (2023:2) Kebijakan Publik di artikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat.

Anderson dalam Agustino dalam Siti Marwiyah (2022:12) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Abdul Wahab dalam Siti Marwiyah (2022:12), kebijakan publik adalah suatu Tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat berpendapat bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang harus dilaksanakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor yang mempunyai tujuan tertentu guna memecahkan suatu permasalahan tertentu dan tahapan pelaksanaan suatu program yang akan diselenggarakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat. Berkaitan dengan suatu permasalahan yang diperhatikan oleh pemerintah, kebijakan publik memberikan suatu tindakan sanksi yang mengarah pada suatu permasalahan yang telah menjadi perhatian penuh pemerintah.

b. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

“Proses pembuatan kebijakan publik yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus diuji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap”.

Dalam Buku Kebijakan dan Pelayanan publik oleh Kurhayadi (2023), tahapan dan proses kebijakan publik dapat berbeda-beda tergantung pada konteks, isu, dan lingkup kebijakan yang dibahas.

Namun, secara umum tahapan dan proses kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Identifikasi Masalah

Tahap pertama dalam perumusan kebijakan adalah mengidentifikasi masalah atau isu yang perlu ditangani oleh pemerintah atau masyarakat. Identifikasi masalah bisa dilakukan oleh pemerintah, kelompok masyarakat, atau pakar.

2) Perumusan Kebijakan

Setelah masalah diidentifikasi, pemerintah akan merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk menangani masalah tersebut. Proses perumusan kebijakan meliputi pengumpulan data, analisis kebijakan yang ada, konsultasi dengan para ahli, dan dialog dengan masyarakat atau kelompok terkait.

3) Penetapan Kebijakan

Setelah proses perumusan kebijakan selesai, kebijakan tersebut akan ditetapkan dalam bentuk keputusan atau peraturan yang resmi. Kebijakan ini biasanya dibuat oleh lembaga pemerintah yang bertanggung jawab, seperti Kementrian, Badan, atau Lembaga Negara.

4) Implementasi Kebijakan

Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan, yaitu pelaksanaan kebijakan dalam praktik. Implementasi kebijakan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lain-lain, yang bertugas untuk melaksanakan program atau kebijakan yang telah ditetapkan.

5) Evaluasi Kebijakan

Tahap terakhir ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana

kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki atau memperbaharui kebijakan yang ada.

2. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata efektif yang mempunyai arti sebagai pengaruh, efek, akibat, atau dapat membawa hasil. Secara umum efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Secara singkat, efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Simamora (dalam Abadi dkk, 2021 : 1 - 2) efektivitas adalah tingkat dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas yang mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu. Sedangkan menurut Makmur (dalam Abadi dkk, 2021 : 2) mengatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan, kebenaran, dan kesalahan dari suatu organisasi. Selanjutnya, untuk menentukan suatu tingkat efektivitas keberhasilan organisasi atau kelompok ataupun negara kita harus membuat perbandingan dengan kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan. Semakin rendah tingkat kesalahan yang terjadi, tentu akan semakin dapat mendekati ketepatan dalam melakukan pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan yang dibebankan.

Hal ini juga selaras dengan pendapat Pasaribu (dalam Abadi dkk, 2021 : 2) yang mengatakan bahwa pada umumnya efektivitas hanya bersumber dari evaluasi atas kesalahan atau kekeliruan yang telah dilakukan pada masa lampau, dipadukan dengan efektivitas berpikir secara rasional, kemudian mengimplementasikan pemikiran itu ke dalam suatu tindakan yang lebih cepat, sehingga tujuan yang hendak dicapai itu dapat memberikan hasil yang memuaskan semua pihak sebagai anggota individu, kelompok maupun sebagai anggota organisasi.

Menurut Hidayat (dalam Rinaldi dkk, 2021 : 10)

mendefinisikan efektivitas sebagai berikut:

"Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya".

Menurut William Dunn (dalam Mokoginta dkk, 2021: 2) mendefinisikan efektivitas adalah suatu kriteria untuk menseleksi alternative untuk dijadikan rekomendasi yang didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi.

Menurut Agung Kurniawan (dalam Mokoginta dkk, 2021: 2)

mengemukakan bahwa:

"Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, sebagai bagian dari sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya yang ada serta tidak terdapat sebuah tekanan terhadap pelaksanaannya".

Gibson, James L., J.M. Ivancevich, J.H. Donnelly (dalam

Setiawan 2022 : 18) memberikan pernyataan sebagai berikut

"Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama". Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas, dan tingkat efektivitas suatu organisasi dipengaruhi oleh perilaku manajemennya.

Pengertian Efektivitas dari Mahmudi (dalam Endrawati, 2023 :

10) efektivitas adalah hubungan antara keluaran menggunakan tujuan atau target yg harus dicapai. Dikatakan efektif jika proses aktivitas mencapai tujuan serta sasaran akhir kebijakan. Sedangkan berdasarkan Mardiasmo (dalam Titin Endrawati, 2023 : 10) efektivitas ialah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai

tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Menurut Syabrina (2017), efektivitas dapat diartikan juga sebagai suatu ukuran yang mengatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas dan waktu yang sudah dicapai oleh manajemen, dimana target yang dimaksudkan telah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. (dalam Joko dkk. 2022: 7)

Dari beberapa pendapat sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dicapai secara tepat dan cepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dengan kata lain efektivitas menekankan pada hasil dalam mencapai tujuan.

b. Ukuran Efektivitas

Untuk mengukur efektivitas tidaklah mudah karena efektivitas dapat dianalisa dari berbagai sudut pandang dan tergantung siapa yang menilainya. Pengukuran efektivitas ini dapat dilakukan dengan melihat dari pencapaian suatu organisasi atau juga dapat dilihat dari keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam pengukuran efektivitas ini diperlukan indikator atau alat ukur efektivitas.

Selain itu, tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah

dicapai. Namun, usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak efektif jika gagal mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan. Adapun standar atau ukuran yang menentukan apakah tujuan tercapai dengan efektif adalah:

- 1) Kejelasan tujuan yang harus dicapai, yang dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas dapat mencapai tujuan yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai;
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, yang dikenal sebagai jalan yang diikuti dalam berbagai upaya untuk mencapai tujuan yang ditentukan agar implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi;
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan;
- 4) Perencanaan yang matang, berarti memutuskan apa yang akan dilakukan organisasi di masa depan;
- 5) Penyusunan program tepat, rencana yang baik harus dimasukkan ke dalam program pelaksanaan yang tepat karena jika tidak, para pelaksana tidak akan memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja;
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana, adalah salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana kerja yang tersedia dan dapat disediakan oleh organisasi;

- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Meskipun programnya bagus, jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka organisasi tidak akan dapat mendapatkan tujuannya karena organisasi semakin dekat tujuannya.

Sementara Gibson (dalam Monica 2022: 137) mengatakan bahwa efektivitas dapat pula diukur sebagai berikut:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap.
- 4) Perencanaan yang matang
- 5) Penyusunan program yang tepat
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana
- 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Menurut Edy Sutrisno (2018:125-126) dalam Akhdiat (2024: 16-17) telah berhasil mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektifitas program didalam sebuah organisasi, yaitu:

- 1) Pemahaman program, yaitu dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program melalui pelatihan keterampilan maupun mengenai sosialisasi tentang Program.
- 2) Tepat sasaran, yaitu dilihat melalui pengetahuan yang telah diberikan para pengelola Program mengenai pemahaman pengetahuan adalah sasaran keterampilan yang dianggap sesuai dengan program tersebut.
- 3) Tepat waktu, yaitu dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan anakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
- 4) Tercapainya tujuan, yaitu diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan, baik melalui pelatihan program maupun kegiatan lainnya.
- 5) Perubahan nyata, yaitu diukur melalui sejauh mana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat.

Menurut Etzioni (dalam Sari, 2021:12) mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang di sebut *SYSTEM MODEL* yang terdiri dari empat kriteria, yaitu adaptasi, integrasi, motivasi dan produksi.

- 1) Adaptasi. Adaptasi mempersoalkan kemampuan organisasi untuk menyelaraskan diri dengan lingkungannya.
- 2) Integrasi. Integrasi merupakan pendekatan yang mengukur tingkat efektivitas terhadap tingkat kemampuan organisasi dalam melakukan sosialisasi, mengembangkan konsensus serta berbagai bentuk komunikasi lainnya.

- 3) Motivasi. Motivasi merupakan pendekatan yang mengukur tingkat efektivitas mengenai kelengkapan sarana dalam pelaksanaan tupoksi, serta hubungan perilaku organisasi dengan organisasinya.
- 4) Produksi. Pendekatan yang mengukur tingkat efektivitas dengan dihubungkannya dengan intensitas kegiatan suatu organisasi serta jumlah dan mutu keluaran suatu organisasi.

Menurut Budiani (dalam Amrizal, 2018: 59 - 60) untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- 1) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- 3) Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Menurut Sharma (dalam Hertati 2020:22) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas yang menyangkut faktor internal dan faktor eksternal antara lain:

- 1) Produktivitas atau output.
- 2) Efektivitas dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi.
- 3) Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Efektivitas digunakan dapat mengukur ketercapaian dari tujuan dari suatu kegiatan. Ketercapaian dari suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan suatu aktivitas merupakan ukuran yang dinyatakan dengan efektifnya kegiatan tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Prastiya, 2014) efektivitas merupakan ketercapaian dari tujuan yang telah disepakati bersama atas suatu aktivitas yang akan dijalankan.

3. Bantuan Sosial Uang

a. Pengertian Bantuan Sosial Uang

Bantuan sosial uang merupakan bentuk intervensi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin atau rentan dalam bentuk uang tunai guna membantu pemenuhan kebutuhan dasar hidup mereka. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2021), bantuan sosial adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami kondisi sosial ekonomi tertentu dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan dan perlindungan sosial.

Sementara itu, World Bank (2020) mendefinisikan *cash transfer* atau bantuan sosial uang sebagai bantuan langsung dalam bentuk uang yang diberikan kepada rumah tangga miskin tanpa syarat pengembalian, dengan tujuan utama untuk mengurangi kemiskinan jangka pendek dan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.

Menurut Suharto (2019:45), bantuan sosial merupakan bagian dari kebijakan kesejahteraan sosial yang berfungsi memberikan perlindungan sosial kepada kelompok masyarakat yang lemah, miskin, dan rentan terhadap risiko sosial. Dengan demikian, bantuan sosial uang dapat diartikan sebagai salah satu instrumen kebijakan sosial untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dengan demikian, Bantuan Sosial Uang tidak hanya diposisikan sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan dasar jangka pendek, tetapi

juga sebagai bagian dari kebijakan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih berkelanjutan (Suryani, 2022).

b. Tujuan Bantuan Sosial Uang

Adapun tujuan dari pelaksanaan bantuan sosial uang antara lain:

1. Membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
2. Mengurangi beban ekonomi keluarga akibat situasi darurat atau krisis.
3. Menjaga daya beli masyarakat miskin agar tetap stabil.
4. Mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.
5. Menjadi bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya yang terdampak secara sosial ekonomi (Kemensos RI, 2021).

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari semua gangguan, kesulitan, dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “*catera*” yang berarti payung. Dalam arti kesejahteraan, “*catera*” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang hidupnya terlepas dari kebodohan, kemiskinan, kekhawatiran, atau ketakutan sehingga hidupnya selalu tentram dan aman, baik lahir maupun batin (Tsabit, 2019). Kesejahteraan adalah keselamatan yang meliputi semua tata kehidupan dan kehidupan sosial, material, maupun kerohanian atau spiritual, kesusilaan dan kedamaian lahir batin setiap masyarakat untuk melakukan berbagai kebutuhan jasmani, spiritual dan sosial yang bermanfaat bagi diri, rumah tangga serta masyarakat (Rosni, 2017).

Kesejahteraan masyarakat adalah segala sesuatu yang terarah dari layanan-layanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang standar dan rasa puas dari kesehatan, hubungan perseorangan serta masyarakat maupun sosial yang memungkinkan mereka bisa kemampuannya berkembang dan kesejahteraannya mereka meningkat selaras dengan semua kebutuhan keluarga atau masyarakat. Kesejahteraan memiliki tujuan seperti terjaminnya kebutuhan ekonomi manusia, memiliki kondisi kehidupan dan standar kesehatan yang selalu layak, memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya, meningkatnya derajat harga diri setinggi mungkin, mempunyai kebebasan berfikir di dalam melaksanakan kegiatan tidak ada gangguan, yaitu kebebasan untuk melakukan hak asasi manusia(Syaiful, 2016).

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur menggunakan indikator kesejahteraan. Dengan indikator kesejahteraan dapat dilihat masyarakat bisa dikatakan sejahtera atau tidak dari ketercapaian masyarakat.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan gambaran secara skematis tentang arah penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran pada penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2019. Menggunakan teori menurut Edi Sutrisno (dalam Amrizal dkk, 2018: 43), yaitu :

1). Pemahaman Program

Pemahaman program, yaitu dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program melalui pelatihan keterampilan maupun

mengenai sosialisasi tentang program dan bagaimana kordinasi yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan program.

2). Tepat Sasaran

Tepat sasaran, yaitu dilihat melalui pengetahuan yang telah diberikan para pengelola Program mengenai pemahaman pengetahuan adalah sasaran keterampilan yang dianggap sesuai dengan program tersebut.

3). Tepat Waktu

Tepat waktu, yaitu dilihat melalui penggunaan waktu untuk proses pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.

4). Tercapainya Tujuan

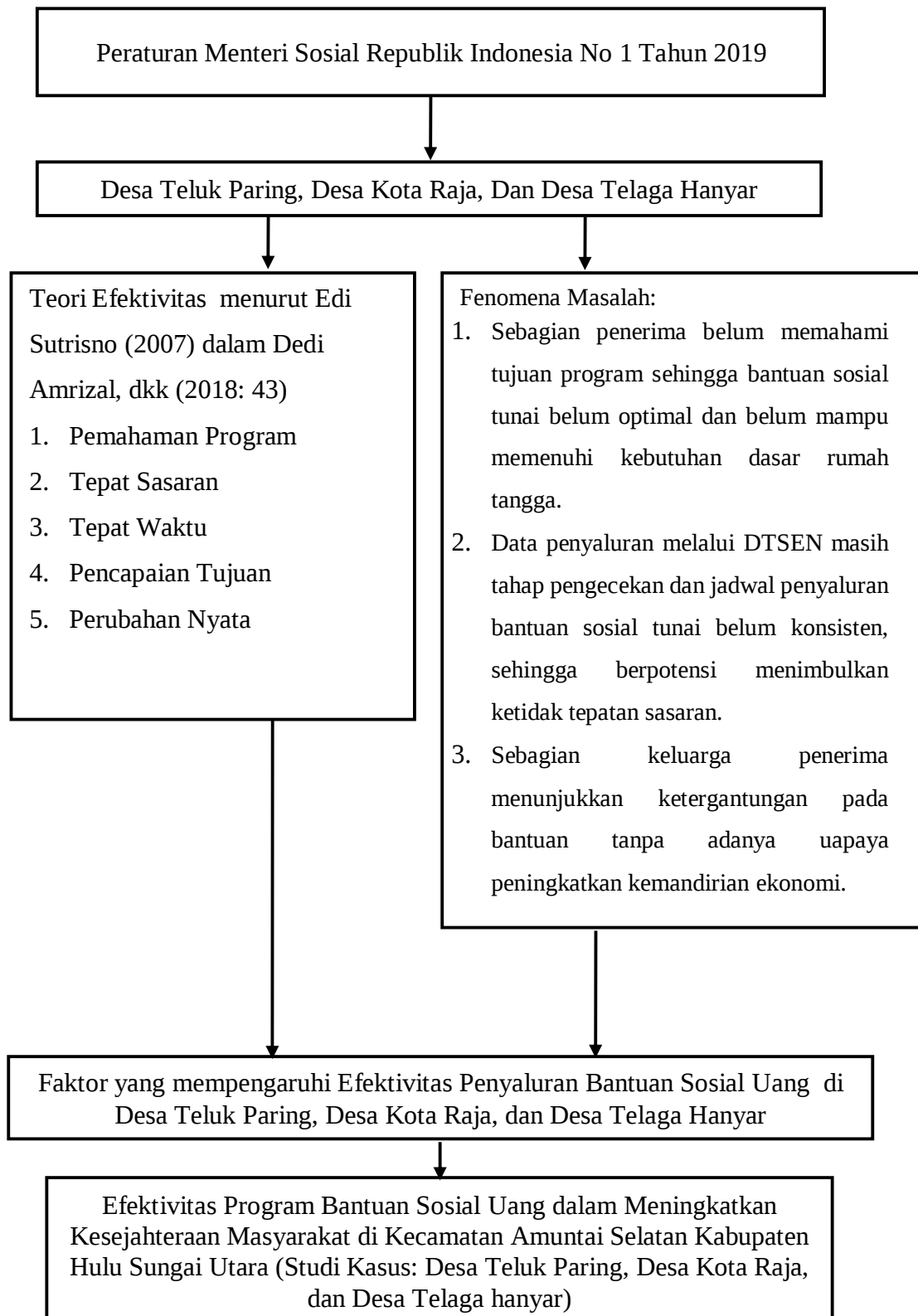
Tercapainya tujuan, yaitu diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

5). Perubahan Nyata

Perubahan nyata, yaitu diukur melalui sejauh mana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat.

Dalam rangka meningkatkan Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Uang di Desa Teluk Paring, Desa Kota Raja dan Desa Telaga Hanyar tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi faktor-faktor tersebut. Kerangka pemikiran ini digunakan untuk menganalisis bagaimana mengatasi permasalahan terkait Penyaluran Bantuan Sosial Uang.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berjumlah 30 Desa dan kemudian diambil 3 desa sebagai studi kasus, yaitu Desa Teluk Paring, Desa Kota Raja, dan Desa Telaga Hanyar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh dari berbagai sumber melalui observasi dan teknik pengumpulan data yang beragam. Peneliti melakukan analisis data untuk memahami secara mendalam efektivitas program yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Uang di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Selatan terutama di desa Teluk Paring, desa Kota Raja, dan Desa Telaga Hanyar.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian Pada kajian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu kajian mendeskripsikan atau menggambarkan suatu permasalahan, populasi situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis. Kajian deskriptif lebih menggambarkan kondisi yang apa adanya sesuai dengan yang terlihat di lapangan. Data dikumpulkan berdasarkan hasil dari beberapa sumber seperti catatan observasi, catatan wawancara, observasi, dan dokumentasi (Fiantika et al., (2022)).

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan bahan-bahan yang masih mentah yang dikumpulkan peneliti dan kemudian diolah sehingga bisa menghasilkan informasi dan keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif dan yang akan menunjukkan fakta.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang bisa diambil secara langsung dari objek utama lapangan dan data tersebut memiliki hubungan yang berkaitan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan yang dicari peneliti. Pengumpulan data primer atau data utama dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kepala Desa serta sebagian masyarakat sebagai salah satu faktor pendukung penerima Bantuan Sosial Uang di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya data didapatkan melalui orang lain atau melalui dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah informan. Sumber data dipilih secara *purposive sampling*. Surahman et al. (2016:96) mendefinisikan *Purposive sampling* sebagai sebuah teknik pengambilan sampel yang dilakukan atas dasar pertimbangan peneliti semata yang menganggap bahwa unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang peneliti harapkan, sehingga memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Sehingga sumber data yang penulis terapkan pada penelitian ini akan diperoleh oleh informan. Adapun teknik penarikan sampel ini adalah *Purposive sampling* yang digunakan dalam situasi dimana seorang ahli menggunakan penilainnya memilih responden dengan tujuan tertentu. Informan yang ditetapkan penulis berjumlah 13 orang sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1		Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1 Orang
2		Staff Bidang Rehabilitasi Sosial	1 Orang
3		Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Amuntai Selatan	1 Orang
4		Kepala Desa Teluk Paring	1 Orang
5		Masyarakat Desa Teluk Paring	3 Orang

6		Kepala Desa Kota Raja	1 Orang
7		Masyarakat Desa Kota Raja	3 Orang
8		Kepala Desa Telaga Hanyar	1 Orang
9		Masyarakat Desa Telaga Hanyar	1 Orang
Jumlah			13 Orang

Sumber data: Dibuat oleh peneliti tahun 2025

E. Desain Operasional Penelitian

Operasional penelitian merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengimplementasikan penelitian, desain operasional penelitian yang baik akan memastikan bahwa penelitian dapat dilaksanakan secara terstruktur. Desain operasional juga jelas menggambarkan bagaimana sebuah penelitian akan dilakukan.

Adapun pada penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas menurut Edy Sutrisno (2007) dalam Dedi Amrizal, dkk (2018: 43). Lima aspek utama pengukuran efektivitas. berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka untuk memudahkan penelitian dirancanglah desain operasional sebagai berikut.

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Efektivitas Program Menurut Teori Edy Sutrisno (2007)	Pemahaman Program	a. Pemahaman pelaksana terhadap Program b. Kordinasi Pelaksanaan Program

dalam Dedi Amrizal, dkk (2018:43)	Tepat Sasaran	a. Ketepatan Penerima Program b. Mekanisme Penentuan Sasaran
	Tepat Waktu	a. Ketepatan Waktu Pelaksanaan penyaluran b. Proses Pelaksanaan Program
	Tercapainya Tujuan	a. Tercapai Tujuan Program b. Sesuaian Hasil Dengan Harapan
	Perubahan Nyata	a. Dampak Dari Program b. Kebermanfaatan Program

Sumber: Dibuat oleh peneliti tahun 2025

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), observasi adalah peninjauan secara cermat. Observasi merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya seperti telinga, mulut, penciuman dan kulit. Observasi adalah proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan.

Menurut Nasution dalam Sembiring et al. (2024:169) menyatakan bahwa observasi merupakan suatu fondasi ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya dapat melakukan penelitian berdasarkan data, yaitu fakta-fakta mengenai realitas dunia yang diperoleh melalui observasi. Melalui

observasi, peneliti dapat memahami perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan suatu permasalahan yang teliti. Wawancara dapat didefinisikan sebagai pertemuan antara dua individu dengan tujuan bertukar informasi dan ide melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban, yang bertujuan untuk konstruksi makna dalam suatu topik tertentu.

Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2020:304) mendefinisikan wawancara sebagai berikut. *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and join construction of meaning about a particular topic”*. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pihak yang terkait yaitu pegawai di Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan masyarakat penerima Bantuan sebagai salah satu sumber dalam penerima Program Bantuan Sosial Uang. Melalui wawancara ini nantinya akan diperoleh keterangan lebih lanjut mengenai bagaimana Efektivitas Program Bantuan Sosial Uang di wilayah Amuntai Selatan Khususnya di Desa Teluk Paring, Desa Kota Raja, dan Desa Telaga Hanyar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, penyediaan dokumen untuk memperoleh pengetahuan, keterangan, serta bukti, dan menyebarkannya kepada pihak terkait. Sedangkan dalam penelitian dokumentasi merupakan dokumen yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian yang asli atau langsung dari sumbernya.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020:320) analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Hubberman (1984) dalam Sugiyono (2020:321) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Menurut Fiantika et al., (2022:38), Analisis data adalah tahapan-tahapan mengumpulkan dan menyusun dengan sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman audio visual dengan cara mengidentifikasi dan memilih data yang penting membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Adapun aktivitas dalam analisis data di antaranya yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang dikumpulkan direduksi kemudian dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok dan penting. Mereduksi data berdasarkan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih fokus terhadap hasil pengamatan dan memudahkan peneliti mencari kembali data tambahan yang diperlukan untuk melengkapi data-data tersedia.

2. *Data Display* (Display Data)

Menyajikan data yang tersedia berdasarkan kategori dalam bentuk matriks sehingga mempermudah peneliti dalam mengamati pola-pola hubungan antara data yang satu dengan yang lainnya.

Dengan displaying data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Fiantika et al., (2022:180-186). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Memperpanjang Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dan meningkatkan kredibilitas data sebab memberikan waktu kepada peneliti untuk dapat kembali ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara terhadap informan baik informan yang lama maupun informan yang baru yang dapat memberikan informasi baru sehingga informasi lebih akurat.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain itu, penulis dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Penulis dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah pengujian kredibilitas informasi yang di peroleh peneliti melalui pengecekan informasi dengan membandingkan dari sumber, cara dan waktu sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya bias.

4. Analisis Kasus Negatif

Analisis kasus Negatif adalah kasus yang ditemukan tidak sesuai dengan hasil penelitian. Analisis kasus negatif dapat meningkatkan

kredibilitas informasi karena akan “memaksa” peneliti untuk mencari informasi yang berbeda dan bertentangan dengan temuan.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan Referensi diartikan sebagai bahan pendukung untuk membuktikan informasi yang ditemukan oleh peneliti adalah kredibel. Misalnya pada saat wawancara dibutuhkan bahan referensi berupa rekaman wawancara sebagai bukti kebenaran sumber informasi serta data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

6. Mengadakan *Membercheck*

Membercheck adalah proses pengecekan informasi yang diperoleh peneliti yang didapatkan dari sumber informasi. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh informasi yang diperoleh sudah sesuai dengan sumber informasi. Apabila tidak ada perbedaan informasi yang diterima peneliti dengan informasi dari sumber informasi maka informasi tersebut kredibel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, F., dkk. (2021). *Konsep Efektivitas dalam Organisasi Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amrizal, D., dkk. (2018). *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Anonim. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Anonim. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*.
- Anonim. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.
- Anonim. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai*.
- Anonim. (2019). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial*.
- Akhdiat, R. (2024). *Analisis Efektivitas Program Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Budiani, N. (2018). *Pengukuran Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Dye, T. R. (dalam Marwiyah, S. 2022). *Tinjauan Teoretis Kebijakan Publik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Endrawati, T. (2023). *Analisis Kinerja dan Efektivitas Organisasi Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fiantika, F. R., Sembiring, L. R., & Surahman, A. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hertati, L. (2020). *Teori dan Pengukuran Efektivitas dalam Manajemen Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Kurhayadi. (2023). *Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Makmur. (2018). *Efektivitas Program dan Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Marwiyah, S. (2022). *Tinjauan Teoretis Kebijakan Publik di Indonesia*.

Surabaya: Airlangga University Press.

Mokoginta, R., dkk. (2021). *Analisis Efektivitas Program dalam Kebijakan Publik*. Manado: Universitas Negeri Manado Press.

Nasution. (2024). *Dasar-dasar Observasi dalam Penelitian*. Medan: Unimed Press.

Porwati, R. (2021). *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Padang Basar Hilir dan Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Prastiya, D. (2014). *Pengantar Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahmawati, N. (2021). “Efektivitas Bantuan Sosial Tunai dalam Menjaga Daya Beli Masyarakat Miskin.” *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 45–56.

Rinaldi, A., dkk. (2021). *Konsep Efektivitas dalam Organisasi Publik Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rosni. (2017). “Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Pembangunan.” *Jurnal Pembangunan Sosial*, 5(1), 12–20.

Saputro, A. (2020). *Teori Efektivitas Richard M. Steers*. Yogyakarta: Deepublish.

Setiadi, R. (2022). *Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Setiawan, R. (2022). *Konsep Efektivitas dalam Organisasi Publik Modern*. Malang: UB Press.

Steers, R. M. (2020). *Organizational Effectiveness: Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surahman, A., dkk. (2016). *Teknik Sampling dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suryani, T. (2022). “Bantuan Sosial Tunai sebagai Instrumen Kebijakan Sosial.” *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(1), 77–89.

Syafriyani, I. (2023). *Analisis Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Syaiful, A. (2016). "Indikator Kesejahteraan dalam Perspektif Ilmu Sosial." *Jurnal Sosial Politik*, 3(2), 88–97.

Tsabit, M. (2019). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kencana.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Definisi dan Pelaksanaan Bantuan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

Suryani, T. (2022). *Bantuan Sosial Uang sebagai Instrumen Kebijakan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan*. *Jurnal Sosial Humaniora*, 101, 77-89.

Suharto. (2019). *Kebijakan dan Implementasi Bantuan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ilmu Sosial.

World Bank. (2020). *Cash Transfers Programmes: Reducing Poverty and Vulnerability*. Washington, DC: World Bank.